

NOTULEN

RAPAT PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SETJEN WANTANNAS 2020-2024

1. Dasar:

- a. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- d. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 76 Tahun 2019 Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Setjen Wantannas; dan
- e. Surat Undangan Nomor Und-96/OT.05/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

2. Pelaksanaan:

- a. Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2020
- b. Waktu : Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Rapat NKRI
- d. Agenda : Penyusunan Road Map RB 2020-2024
- e. Peserta : Terlampir sebagaimana dalam undangan
- f. Pimpinan : Ketua Tim Pelaksana RB, Deputi Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono

3. Beberapa point penting dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam mengawali pembukaannya, Deputi Pengembangan menyampaikan bahwa struktur organisasi Setjen Wantannas berbeda dengan unit kerja di K/L lain. Contoh kecil adalah di K/L lain terdapat Sekretaris Deputi, sementara di Setjen Wantannas tidak ada jabatan tersebut, sehingga seluruh pekerjaan tentang administrasi dan kesekretariatan di kerjakan oleh TU Deputi.
- b. Perbedaan selanjutnya adalah ketersediaan anggaran Setjen Wantannas yang kecil dibanding dengan K/L lain. Namun demikian perbedaan tersebut tidak menjadikan tuntutan program RB berbeda. Kementerian PANRB telah menetapkan target-target yang perlu dipenuhi oleh setiap K/L dan Pemda tanpa memandang kondisi institusi tersebut.

- c. Oleh karena itu dalam konteks program RB di Setjen Wantannas, seluruh personil yang telah ditunjuk melalui Keputusan Sesjen dalam Tim Pelaksana RB dapat memenuhi target yang telah ditetapkan serta memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan Kementerian PANRB.
- d. Sesuai dengan PermenPANRB No.81/2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, bahwa tahapan RB pada kurun waktu 2020-2024 adalah tahapan yang terakhir. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 seluruh target yang dicanangkan dapat terpenuhi secara maksimal (100%).
- e. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian dalam Dokumen *Road Map* adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana perlunya pegawai menggunakan cara-cara digital dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang proses kerjanya. Dalam hal ini Setjen Wantannas telah mengembangkan beberapa aplikasi internal semisal Sanrice, Simdokji, dll.
- f. Deputi Pengembangan juga menjelaskan mengenai beberapa isu strategis pelaksanaan RB yaitu : 1) Birokrasi yang mengakomodir tuntutan revolusi industri 4.0; 2) Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi; 3) Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik; 4) Penguatan budaya birokrasi yang positif.
- g. Dalam konteks pengembangan SDM Aparatur, mengharuskan setiap pegawai agar secara pro aktif menjalankan program-program RB. Pegawai tersebut tidak cukup hanya duduk di meja kerjanya saja. Namun perlu usaha dalam berkoodinasi dan berkomunikasi dengan pegawai lainnya atau bahkan lintas unit kerja.
- h. Dalam tataran penguatan organisasi, agenda revitalisasi/restrukturisasi Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN) menjadi agenda prioritas yang akan terus didorong. Tim Pokja DKN telah menyempurnakan Rancangan Nasmik dan Rancangan Perpres DKN dengan melibatkan partisipasi dari tiga jalur pengkajian (birokrasi, akademisi, dan praktisi) sehingga diharapkan muatannya lebih komprehensif.
- i. Agenda revitalisasi/restrukturisasi Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN) juga akan menjadi quick wins mandiri Setjen Wantannas.
- j. Sosialisasi program-program RB perlu secara intensif dilakukan sehingga seluruh tataran pegawai hingga unit pelaksana terkecil dapat memahami urgensi program RB tersebut.

- k. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan sebagaimana arahan Presiden telah ditindaklanjuti oleh Setjen Wantannas. Dalam hal ini Setjen Wantannas telah melakukan inventarisasi dan usulan penyesuaian jabatan struktural ke fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut juga merupakan *quick wins mandatory* yang telah ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) untuk segera di respon dalam satu dan dua tahun kedepan.
 - l. Penguatan budaya birokrasi yang positif perlu terus diupayakan. Salah satu hikmah pandemik Covid-19 adalah terbangunnya mekanisme *Work Form Home* (WFH) yang tetap dapat produktif bekerja dengan memanfaatkan perangkat digital. Kedepan, mekanisme WFH perlu ditunjang dengan penguatan perangkat Sisfo agar kegiatan WFH dapat terselenggara dengan baik.
 - m. Beberapa isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti adalah 1) Integrasi media informasi JDIH Setjen Wantannas dengan JDIH Nasional; 2) Restrukturisasi organisasi berbasis kinerja; 3) Peningkatan Indeks SPBE; 4) Pelaksanaan merit sistem dan manajemen talenta ASN; dan 5) *Open bidding*/lelang jabatan.
 - n. Kegiatan *open bidding*/lelang jabatan adalah satu hal yang belum dilakukan oleh Setjen Wantannas, padahal hal tersebut merupakan salah satu bagian program RB yang cukup penting karena mempunyai bobot nilai yang paling besar.
 - o. Pada tahun ini sudah dialokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut, namun tetap diperlukan tahapan perencanaan yang matang dan koordinasi serta komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait agar kegiatan *open bidding* pada tahun 2020 dapat terwujud. Apabila kegiatan ini dapat terwujud, kinerja dan nilai RB dapat terdongkrak naik.
 - p. Proses pelaporan LHKASN telah mencapai 100%, sementara pelaporan LHKPN sudah mencapai 80%. Perlu sosialisasi kepada pihak yang belum menyampaikan laporan tersebut.
 - q. Draft Road Map 200-2024 perlu diperkaya kembali dengan muatan yang terdapat pada PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada sub penilaian pengungkit yang mencakup aspek pemenuhan, aspek antara, dan aspek reform.
4. Kesimpulan:
- a. Kepada masing-masing Ketua kelompok area perubahan agar dapat membaca dan mengkaji kembali draft Road Map RB tersebut. Apabila terdapat saran dan masukan dapat disampaikan kepada Sekretaris RB.

- b. Diharapkan setiap kelompok membuat target kerja masing-masing. Target yang telah ditetapkan dapat memunculkan energi yang mendorong semangat untuk mencapai target tersebut.

Notulis,

Enang Suhendar
NIP. 198105262009011002

LAMPIRAN



